



Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Turut berduka cita atas telah berpulang ke rahmatullah rekan kita Bp. Adriansyah Kepala UPTD KPH Wilayah X Dempo Sumatera Selatan. Semoga almarhum husnul khotimah, mendapat tempat yang paling mulia disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran dan ketabahan dalam iman. Aamiin ya rabbal 'alamiin.

Pendahuluan : Tentang Perhutsos

- Peraturan Presiden (PERPRES) No.58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menempatkan Perhutanan Sosial sebagai program strategis untuk pemerataan ekonomi.
- Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
- Sejak 2016 secara nasional telah dicanangkan 12.7 juta hektar kawasan hutan melalui 5 skema PS: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK)

DASAR HUKUM POKJA PPS

Pokja PPS Sumsel mulai diinisiasi oleh Pemerintah, NGO dan Akademisi

- Pada tahun 2016 berdasarkan ketentuan Permenhut No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Perdirjen PSKL Nomor: P.14/PSKL/SET/PSL.0/ 11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS).

Pembentukan POKJA PPS Sumsel

- POKJA PPS Sumsel terbentuk pada 20 Februari 2017 dengan SK Gubernur 154/KPTS/DISHUT/2017, yang di ketuai oleh Prof. Dr. Ir. Robiyanto H. Susanto, M.Agr. Sc. Prof Robi meninggal dunia pada September 2017 akibat serangan jantung.
- Gubernur Sumsel kemudian mengeluarkan SK Perubahan Nomor 717/KPTS/DISHUT/2017 dan menunjuk Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr untuk melanjutkan kepengurusan hingga Maret 2020.

Potensi Perhutanan Sosial 2017 -2020

SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 22/Menlhk/Setjen/ PLA.0/1/2017 tentang Peta Indikatif Perhutanan Sosial Sumsel seluas 413.626 Ha

Alokasi Areal Kemitraan : 181.964 Ha

Alokasi Indikatif Areal HD, HKm, HTR : 231.662 Ha

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial REVISI III Nomor SK. 744/MENLHK-PKTL/REN/ PLA.0/1/2019 seluas 262.632 Ha, dengan sebaran lokasi berdasarkan fungsi hutan adalah :

- ✓ Hutan Lindung : 29.521 Ha
- ✓ Hutan Produksi : 167.199 Ha
- ✓ Hutan Produksi Konversi : 21.947 Ha
- ✓ Hutan Produksi Terbatas : 43.965 Ha

Target yang ditetapkan POKJA PPS Sumatera Selatan 2017 -2020 pada penyusunan rencana kerja yang dilaksanakan tanggal 29-30 Maret 2017 adalah 150.000 ha.

NO	NAMA KPH	NAMA UPTD KPH	PIAPS REVISI III			REAL SD APR 2020	
			KPHL	KPHP	LUAS	JMLH UNIT	LUAS (Ha)
1	Meranti	Wilayah I Meranti		23,956	23,956	8	9,151
2	Lalan Mangsang Mendis	Wil. II Lalan Mendis		54,511	54,511	7	33,636
3	Banyuasin	Wilayah III Plg -Banyuasin	19,752		19,752	2	714
4	Unit XXIII Sumsel	Wilayah IV Sungai Lumpur – Riding		8,031	8,031		
5	Unit XXIV Sumsel	Wilayah IV Sungai Lumpur – Riding		5,994	5,994	2	10,123
6	Unit XXI Sumsel	Wilayah V Lempuing - Mesuji		5,920	5,920		
7	Unit XXII Sumsel	Wilayah V Lempuing - Mesuji		6,152	6,152	28	7,150
8	Bukit Nanti	Wilayah VI Bukit Nanti – Martapura	7,055		7,055		
9	Unit XX Sumsel	Wilayah VI Bukit Nanti – Martapura		5,449	5,449	35	2,775
10	Unit XIX Sumsel	Wilayah VII Mekakau - Saka		1,660	1,660		
11	Peraduan Gistang	Wilayah VII Mekakau - Saka	27		27	29	14,027
12	Unit XVII Sumsel	Wilayah VII Mekakau - Saka	2,002		2,002		
13	Ogan Ulu	Wilayah VIII Semendo	5,326		5,326	23	20,833
14	Subanjeriji	Wilayah IX Suban Jeriji		40,345	40,345	2	261
15	Dempo	Wilayah X Dempo	2,143		2,143	10	3,259
16	Unit IX Sumsel	Wilayah XI Kikim - Pasemah	3,252		3,252		
17	Unit XI Sumsel	Wilayah XI Kikim - Pasemah	128		128	1	585
18	Benakat	Wilayah XII Benakat		16,213	16,213	1	5,800
19	Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong	Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong		19,503	19,503		
20	Unit VIII Sumsel	Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong		4,725	4,725	7	3,013
21	RAWAS	KPH Wilayah XIV Rawas		7,853	7,853	0	-
LUAS TOTAL			39,684	200,313	239,997	155	111,326

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial REVISI III

SK Nomor 744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 seluas 262.632 Ha (diluar konsesi)

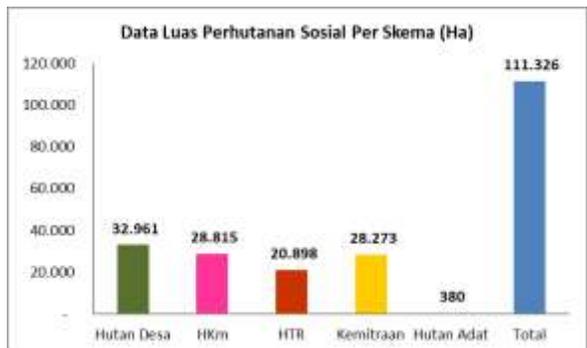
Capaian dan Perkembangan Perizinan Perhutanan Sosial

1). Pencapaian izin/hak perhutanan sosial sampai dengan Maret 2020 sudah mencapai 155 izin, jumlah anggota 17.825 KK dengan luas 111.326,05 Ha. Jumlah unit dan Luas masing-masing skema sebagai berikut :

- ✓ Hutan Desa 23 unit seluas 32.961 Ha, anggota 2.957 KK
- ✓ HKm, 57 unit seluas 28.814,64 Ha, anggota 5.880 KK.
- ✓ HTR 67 Unit, seluas 20.897,57 Ha, anggota 3.603 KK
- ✓ Kemitraan Kehutanan 6 unit, seluas 28.273 Ha, anggota 5.002 KK
- ✓ Hutan Adat sebanyak 2 unit, seluas 379,7 Ha.

TABEL PERKEMBANGAN LUAS LAHAN IZIN PERHUTANAN SOSIAL WILAYAH UPTD KPH PROVINSI SUMATERA SELATAN s/d JUNI 2020

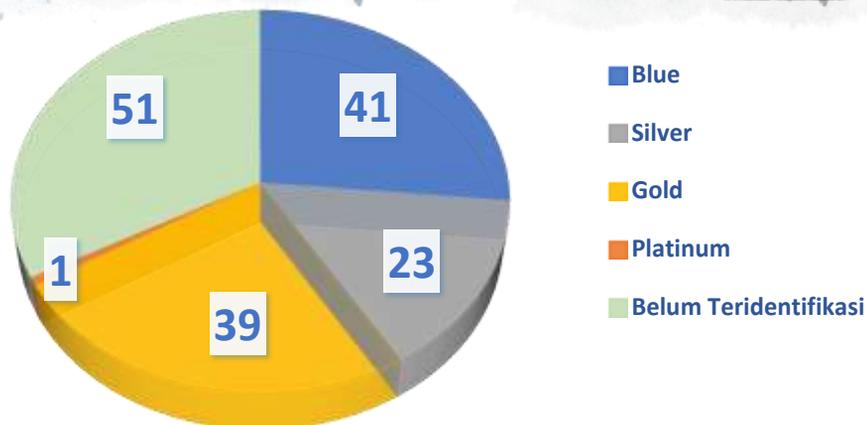
UPPER	HD		HKm		HTR		Kemitraan		Hutan Adat		Total	
	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
WIL. LEMBAH	0	0,00	1	2182,00	1	6.659,00	2	900,00	0	0	0	9.141,00
WIL. B. ALAN MENDONG	2	11.181,00	1	921,00	1	3.938,00	0	17.371,54	0	0	0	33.010,54
WIL. B. PAL. EMASANG SANYUAN	0	0,00	2	714,00	0	0,00	0	0,00	0	0	2	714,00
WIL. B. SUNGAI LUMPUR BTO RINDO	0	0,00	1	121,00	0	0,00	1	10.000,00	0	0	2	10.121,00
WIL. B. MESULU	0	0,00	0	0,00	20	7.148,84	0	0,00	0	0	20	7.148,84
WIL. B. BUKIT NANTI-MPA	0	0,00	3	859,00	32	1.815,73	0	0,00	0	0	35	2.774,73
WIL. B. MEGALU SAGA	0	0,00	26	11809,44	3	2.217,00	0	0,00	0	0	29	14.026,44
WIL. B. MUSENENGO	14	17.678,00	0	2911,00	0	0,00	0	0,00	1	44	23	20.629,00
WIL. B. SUBAN VERA	1	175,00	1	86,00	0	0,00	0	0,00	0	0	2	261,00
WIL. B. ODHOP	0	0,00	0	2971,00	0	0,00	0	0,00	1	136	10	4.258,00
WIL. B. KEM. PASEMAN	0	0,00	1	585,00	0	0,00	0	0,00	0	0	1	585,00
WIL. B. BENAAT	0	0,00	1	5800,00	0	0,00	0	0,00	0	0	1	5.800,00
WIL. B. LANTAN B. COGONG	0	2.723,00	1	290,00	0	0,00	0	0,00	0	0	2	3.013,00
WIL. B. RAVANG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Jumlah	24	32.961,00	57	28.814,64	67	20.897,57	6	28.273,00	2	380	155	111.326,05



Capaian dan Perkembangan Perizinan Perhutanan Sosial

- 2) Peningkatan Kapasitas berupa pelatihan-pelatihan. Sejauh ini sudah dilakukan lebih dari 20 pelatihan untuk KPH, NGO dan stakeholder lainnya.
- 3) Fasilitasi penyusunan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang : Sudah ada 89 PS yang sudah mempunyai RKU, RPHD dan 1 RPHA, sehingga 66 izin/hak perhutanan sosial lainnya belum memiliki dokumen RKU/RPHD/RPHA.
- 4) Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa difasilitasi oleh WRI Indonesia bersama mitra HaKI, ForDAS, KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 5) Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) : Sudah terbentuk sebanyak 104 KUPS, dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - ✓ Biru (Blue) : 41 KUPS
 - ✓ Perak (Silver) : 23 KUPS
 - ✓ Emas (Gold) : 39 KUPS
 - ✓ Platinum : 1 KUPS
 - ✓ Belum teridentifikasi : 51 KUPS

Klasifikasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial



Capaian dan Perkembangan Perizinan Perhutanan Sosial

- 6) Beberapa KPS dan KUPS mendapatkan bantuan permodalan dari pihak ketiga, diantaranya adalah :
- Pada tahun 2018, 1 Gapoktan di wilayah kerja UPTD KPH Lalan Mendis mendapatkan KUR dari BNI ± 6 Milyar Rupiah. Namun dalam pelaksanaannya mengalami kredit macet dengan alasan komoditas yang ditanam terbakar pada musim kemarau Tahun 2019.
 - Pada Tahun 2019 + 140 KK mendapatkan KUR BRI per KK Rp.25 juta jumlah total Rp. 3,5 M.
 - Pada Maret 2020 KUPS Krambi Mandiri LPHD Lubuk Rumbai dengan anggota 33 KK di wilayah UPTD KPH Lakitan Bukit Cogong mendapat BLU – Pusat P2H sejumlah Rp. 1,3 M.
 - Sebanyak 49 KUPS mendapatkan bantuan alat ekonomi produktif dari BPSKL Motor Bak 3 roda, alat pengupas kopi, mesin penggiling/penumbuk kopi, mesin pengupas padi, mesin pengupas kulit pinang dan hand tractor.
 - Penghargaan Tokoh Perhutanan Sosial Nasional 2019



Gapoktan Lempuing Jaya, Kecamatan Lempuing OKI, UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji

Penghargaan Tokoh Perhutanan Nasional 2019



Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pra Izin

- 1) Terbentuknya Tim Pemetaan dan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Hutan Adat : SK Ketua POKJA No. 01/SK/POKJA PPS-Sumsel/1/2019
- 2) Fasilitasi Pemetaan potensi Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Hutan adat Provinsi Sumatera Selatan: di fasilitasi oleh WRI Indonesia, HaKI, Dinas Kehutanan. Total jumlah konflik teridentifikasi adalah 123 kasus.
- 3) Konflik tenurial masyarakat dengan PT. Musi Hutan Persada : Difasilitasi oleh KLHK, BPSKL, Dinas Kehutanan, KPH, WALHI, HaKI, Lingkar Hijau, LBH Palembang dan Solidaritas Perempuan
 1. Desa Rukun Rahayu Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin.
 2. Desa Mekarjaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin.
 3. Desa Bumi Makmur Kabupaten Musi Rawas
 4. Dusun Cawang Gumilir Kabupaten Musi Rawas
 5. Desa Semangus Baru Kabupaten Musi Rawas
 6. Desa Merbau Kec. Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
 7. Desa Banyu Ayu Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. Ogan Komering Ulu Timur
 8. Kelurahan Veteran Jaya dan Sungai Tuha Kec. Martapura Kab. OKU Timur
 9. Desa Lematang Jaya Kec. Merapi Timur Kab. Lahat
 10. Desa Sukoharjo Kec. Kikim Timur Kab. Lahat
 11. Verifikasi Rimbo Sekampung Kec. Benakat Kab. Muara Enim

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pra Izin

- 4) Penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT. REKI dengan KTH Sungai Kapas Tengah dan KTH Suban Mas Desa Sako Suban Kab. Musi Banyuasin (Fasilitasi oleh HaKI, KPH Meranti dan Dishut).
- 5) Konflik antara PT. Bumi Persada Permai dengan masyarakat Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir tercapai kesepakatan dengan penandatanganan MoU Kemitraan Kehutanan (Fasilitasi oleh HaKI dan Keola Sendang)
- 6) Konflik antara masyarakat Desa Kepayang dengan IUPHHK-HTI PT.Wahana Lestari Makmur Sukses : telah dilakukan proses pendekatan antara perusahaan dengan masyarakat yang diarahkan untuk skema kemitraan.
- 7) Fasilitasi Penyelesaian Konflik 5 KTH di Desa Sembatu Jaya Kabupaten Musi Rawas, UPTD KPH Benakat. Di fasilitasi oleh WRI Indonesia, HaKI, Dinas Kehutanan, KPH Benakat

Fasilitasi Penanganan Konflik Paska Izin

- 1) Konflik status hukum pada 4 izin PS yang berada di areal PT. Pakerin di Wilayah Kerja UPTD KPH Meranti disebabkan status hukum IUPHHK-HTI PT. Pakerin yang dicabut ternyata belum inkrah (dalam proses penyelesaian konflik yang langsung difasilitasi penyelesaiannya oleh KLHK).
- 2) 2 izin PS di Desa Mendah Kec. Jayapura Kabupaten OKU Timur pada wilayah kerja UPTD KPH Mekakau Saka, berkonflik dengan KTH yang lain (Status dalam proses penyelesaian konflik difasilitasi oleh UPTD KPH Mekakau Saka).
- 3) 2 izin HKm KTH Veteran Jaya dan Sinar Barokah berkonflik dengan PT. MHP, karena ada sebagian lahan HKm terdapat tanaman PT. MHP (proses penyelesaian difasilitasi oleh KLHK).

INOVASI POKJA PPS SUMSEL UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERHUTSOS

- Fasilitasi Pembuatan Pergub No.58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial. Dengan Pergub ini, izin Perhutanan Sosial dapat didelegasikan kepada Gubernur dengan ketentuan Sumsel memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- Membentuk Kelompok Kerja Pemetaan dan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Hutan Adat. SK Ketua POKJA No. 01/SK/POKJA PPS-Sumsel/1/2019 (Difasilitasi oleh WRI Indonesia, HaKI, KPH dan Dishut)
- Sarasehan dan Pameran Perhutanan Sosial tahun 2019, melibatkan para pihak perhutanan Sosial dan Masyarakat Pemegang Izin Perhutanan Sosial Se Provinsi Sumatera Selatan ; Diselenggarakan oleh PSKL, BPSKL, Dinas Kehutanan, LSM Mitra Pembangunan (HaKI, Pinus, WRI Indonesia, Yayasan Belantara, Forum DAS, IDH dan ZSL Kelola Sendang)
- Pembentukan Kelembagaan Himpunan Masyarakat Perhutanan Sosial (HMPS) pada tanggal 13 Pebruari 2020 : Difasilitasi oleh HaKI, Walhi Sumsel dan Kemitraan. Terpilih sebagai ketua umum adalah Bapak Ir. Eko Agus Sugianto (Stafus Gubernur Sumsel - Bidang Ekonomi Kreatif)
- Membuat website penyediaan informasi perkembangan perhutanan sosial Sumsel. Difasilitasi oleh HaKI Setapak dan WRI Indonesia.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

- 1) **Penyiapan kawasan (Kebijakan, PIAPS, konflik):** Beberapa lokasi yang menjadi lokasi potensial perhutsos masih berstatus konflik, baik dengan pemerintah seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa, dan Perusahaan.
- 2) **Sejauh ini Sumsel masih belum ada skema perhutsos Kemitraan Konservasi** padahal beberapa lokasi di MUBA, Banyuasin, Lahat dan OKI berpotensi untuk dikembangkan.
- 3) **Pendampingan: Ketersediaan jumlah pendamping tidak sesuai dengan jumlah izin dan/atau KPS, KUPS.** Jumlah pendamping tahun 2020 ada 43 orang untuk 155 izin.
- 4) **Pengembangan usaha: Sampai tahun 2020, masih sedikit KPS/KUPS yang mengembangkan usahanya.** Yang ada baru usaha terkait kopi, madu, purun, sere wangi, asap cair dan jahe merah.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

- 5) **Kelembagaan KPS :** Rata-rata kemampuan pemegang izin dalam mengelola wilayah kelola-nya masih lemah. Rata-rata masih *business as usual*. Kelembagaan juga tidak fungsional, cara kerja masih *individual patron*.
- 6) **Sejauh ini baru 12 pemegang izin yang menjalankan kewajiban PNB** berupa PSDH yaitu 12 IUPHHK-HTR dari Gapoktan Lempuing Jaya, Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji.
- 7) **Koordinasi:** Ada beberapa usulan PS yang dilakukan tanpa dikoordinasikan dengan KPH/Dshut/POKJA terlebih dahulu sehingga beberapa usulan tidak memenuhi syarat administrasi seperti kependudukan, *clear & clean* lokasi dan luasan. Peran dan kontribusi OPD terkait lainnya dalam Perhutsos masih rendah.
- 8) **Pembiayaan :** paska izin KPS mengalami masalah dalam pengembangan usahanya karena rendahnya akses ke pendanaan/ permodalan. Anggaran dari pemerintah daerah sangat kecil dan bantuan dari pihak ketiga seperti perbankan dan perusahaan masih sangat minim.

REKOMENDASI

- 1) Mendorong keterlibatan para pihak seperti OPD terkait lain seperti sektor perkebunan, koperasi, perikanan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah, perbankan, akademisi dan dunia usaha, terutama dalam pengembangan usaha Perhutsos, termasuk akses pendanaan ke sektor perbankan yang memang masih minim.
- 2) Penyelesaian konflik pra dan paska izin : Meningkatkan peran Tim Pemetaan dan Penanganan konflik tenurial kawasan hutan dan hutan adat di POKJA PPS, dan meningkatkan koordinasi dengan para pihak untuk mencari *best mutual acceptable solution*.
- 3) Penguatan kelembagaan kelompok pemegang izin PS: Fokus untuk tahun 2020 -2024 sebaiknya ke penguatan kelembagaan PS yang sudah ada seperti kelengkapan kelembagaan (RKU, RKHD, RPHA), pengelolaan kawasan, pengembangan usaha, pembayaran PSDH dan monitoring.

REKOMENDASI

- 5) Pendampingan pengembangan usaha (Klasifikasi KPS/KUPS, Pengembangan Kelompok dalam penyusunan rencana pengelolaan, rencana usaha dan pengembangan usaha)
- 6) Mendorong dan memfasilitasi pengelola perhutsos untuk memenuhi kewajiban PSDH/PNBP.
- 7) Pendanaan/anggaran: Mengajak para pihak seperti pemerintah, dunia usaha, perbankan dan donor bekerjasama mendukung pendanaan pengelolaan Perhutsos.
- 8) Kelembagaan POKJA PPS: fokus di koordinasi dan kerjasama antar stakeholders, pendampingan pengembangan usaha dan fasilitasi penyelesaian konflik.
- 9) Mendorong fasilitasi perhutsos pada wilayah-wilayah konservasi yang potensial dan memenuhi syarat perundangan.
- 10) Melakukan kegiatan yang melibatkan dunia pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi seperti environmental education untuk SD-SMA dan penelitian/pengembangan untuk universitas.



Terima Kasih